

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada strategi manajemen konflik yang digunakan oleh pasangan suami istri beda kasta di Bali. Fenomena mengenai kasta ini masih terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Bali. Seperti pada tahun 2000, terjadi perebutan posisi *sulinggih* (pendeta) yang berhak memimpin upacara *Labuh Gentuh* dan *Bhatara Turun Kabeh* di Pura Besakih Bali. Kasus ini, bermula ketika *sulinggih* yang berasal dari kasta *Brahmana*(*tri sadhaka*) tidak terima jika yang menyelesaikan upacara tersebut adalah *sulinggih* yang berasal dari kasta *jaba* (*sudra*) yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi dalam pandangan “kepantasan” menurut sistem kasta. Karena, masyarakat Bali meyakini, bahwa yang “pantas” menyelesaikan sebuah upacara keagamaan adalah seorang *sulinggih* yang berasal dari kasta *Brahmana*. Padahal, keputusan PHDI Pusat No 102 Um/IV/B/PHDIP/2000 menetapkan bahwa semuasulinggih (*sarwa sadhaka*) berhak menjadi pemimpin upacara (Suryanto dalam Ngarayana, n.d.). Sehingga, peneliti melihat bahwa komunikasi dengan setting budaya Bali yang kompleks akan berperan aktif menjadi potensi konflik.

Di kehidupan manusia, komunikasi menjadi sebuah kebutuhan. Menurut sejumlah penelitian, 75% dari seluruh waktu manusia digunakan untuk berkomunikasi (Tubbs 2000, hal.3). Sehingga komunikasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Karena melalui komunikasi manusia bisa menukarkan gagasan atau pikirannya dengan manusia yang lain. Hal ini sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Frank Dance mengenai komunikasi sebagai proses pertukaran sebuah pikiran atau gagasan (Littlejohn 2009, hal.4).

Proses pertukaran yang terjadi di dalam komunikasi menekankan sifat intersubjektivitas. Bahwa dalam proses komunikasi peran penafsiran masing-masing pihak yang berkomunikasi menjadi penting. Karena, komunikasi dasarnya adalah suatu proses dinamis yang secara berkesinambungan mengubah orang-orang yang berkomunikasi (komunikator-komunikan) (Mulyana 2010, hal.75).

Komunikasi berlangsung dalam beberapa konteks komunikasi. Deddy Mulyana (2010, hal.77) menyebutkan bahwa konteks komunikasi dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti aspek fisik, psikologis, sosial dan waktu. Namun, secara umum untuk mengklasifikasikan konteks komunikasi biasanya dilihat dari jumlah orang yang terlibat di dalam komunikasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus pada konteks komunikasi antarpribadi atau komunikasi interpersonal.

Komunikasi antarpribadi adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung (Mulyana 2010, hal. 81). Definisi tersebut, mengingatkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang memungkinkan adanya interaksi secara langsung maupun tidak langsung dengan sesamanya, semisal dengan keluarga, teman, atau pasangan.

Menurut DeVito (2007) komunikasi interpersonal terjadi ketika proses komunikasi yang berlangsung mengarahkan hal-hal yang bersifat impersonal (umum) menjadi personal (spesifik). Meminjam konsep Buble, maka proses komunikasi interpersonal akan mengarahkan komunikasi yang semula bersifat “I-It” yang menganggap komunikasi hanya sebagai objek atau “it” menjadi “I-Thou” yang mengarahkan komunikasi kearah yang tidak bersifat *self-centered* (*superiority*) melainkan *equality* dengan menerapkan proses transaksional (Beebe 2008,hal.4).

Komunikasi antar persona juga menciptakan iklim untuk membangun pengertian dan penerimaan baik dari komunikator maupun komunikanya (Daniel Yankelovich dalam Beebe 2008, hal. 5). Dengan kata lain, melalui komunikasi antar persona atau komunikasi interpersonal yang baik, akan mengarahkan sebuah hubungan ke arah yang lebih baik, begitu pula sebaliknya.

Seorang psikolog, William Schutz (1966) menjelaskan bahwa cara manusia untuk menciptakan dan mempertahankan sebuah hubungan tergantung dari pemenuhan tiga keinginan utama (*basic needs*), yaitu *affection* atau keinginan untuk mencintai dan menyukai, *inclusion* keinginan untuk menjadi makhluk sosial dan berkelompok, *control* yaitu keinginan untuk memberikan pengaruh ke kehidupan seseorang atau kegiatan tertentu (dalam Wood 2004, hal.10). Sehingga, melalui pemenuhan dari ketiga hal ini akan mempengaruhi bagaimana tipe dan jangka waktu sebuah hubungan akan berlangsung.

Terdapat mitos yang menyatakan bahwa, konflik yang terjadi di hubungan interpersonal bermula dari bagaimana komunikasi yang berlangsung di dalamnya. Konflik dalam hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*) menurut Julia T. Wood terjadi ketika individu mempertahankan pandangan yang berbeda, kepentingan, atau tujuan dan meletakkanya di posisi yang tidak sesuai dengan yang lain atau berlawanan (Wood 2004, hal.241). Konflik signifikan muncul dari diri individu tersebut akibat kepentingan pribadinya. Hal itu merujuk pada asumsi bahwa individu yang berkonflik berasal dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Ditinjau dari bentuknya, konflik dapat berupa pernyataan mengenai kemarahan, adu argumentasi hingga kekerasan.

Sejalan dengan Julia T.Wood, Hocker dan Wilmot (1991) mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan yang dinyatakan antara sekurang-kurangnya dua pihak

yang saling bergantung yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak selaras, ganjaran yang langka, dan gangguan-gangguan dalam mencapai tujuan mereka (dalam Tubbs 2000, hal.221). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konflik akan terjadi diantara orang-orang yang memiliki pertimbangan rasa yang kemudian mempengaruhi emosinya.

Konflik dapat terjadi akibat faktor budaya (*conflict based on culture*). Kultur atau budaya dapat didefinisikan sebagai gaya hidup yang relatif khusus dari suatu kelompok masyarakat yang terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, artefak, cara berperilaku, serta cara berkomunikasi yang disalurkan dari satu generasi ke generasi lainnya (Devito 2002, hal.234). Menambahkan, DeVito (2007, hal.228) juga menyatakan bahwa “*culture will influence the difficulty that you go through when your relationship break up and most culture assume that relationship should be permanent or at least long lasting.*”. Sehingga faktor kultur atau budaya akan memiliki andil besar dalam menentukan karakteristik sebuah kelompok kebudayaan dalam menjalin hubungan interpersonalnya.

Kultur juga berperan dalam perilaku dan cara orang tersebut memulai dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Menurut Avruch, “*culture is about difference*” (Avtur 1999, hal.146). Menjadi ‘terlihat’ wajar ketika perbedaan yang disebabkan oleh budaya memicu konflik baik di lingkungan internal maupun eksternalnya. Menambahkan, Quinn dalam Fernandez' Beyond Metaphor (1991) juga menyebutkan



bahwa “*culture here is seen as transmitted through language, but acts to organize human thought.*” (dalam Avtur 1999, hal 145). Padahal, menurut Koentjaraningrat seharusnya terdapat perbedaan antara pandangan hidup dengan nilai-nilai sebuah budaya agar tidak terjadi disorientasi nilai budaya ke arah yang sempit (Koentjaraningrat 2002, hal. 193-194). Salah satu contohnya konflik yang disebabkan oleh disorientasi nilai budaya ini adalah permasalahan kasta di Bali. Banyak diperbincangkan, bahwa konflik mengenai kasta timbul karena kultur atau budaya hinduisme yang diakarkan menjadi budaya asli hindu Bali yang kemudian ‘merongrong’ lapisan masyarakatnya sendiri menuju pengkotak-kotakan sosial.

Bali, pulau yang sering dijuluki surga dunia namanya sudah terkenal dikalangan wisatawan domestik maupun internasional. Banyak yang datang ke Bali dan mengakui bahwa Bali adalah sumber inspirasi (Suryani 2006). Budaya Bali yang kuat dan eksotis mempesona wisatawan untuk datang dan kembali ke Bali. “*Bali alluring image as a tourist paradise, the government decided to make this island the showcase of Indonesia.*” (Picard 2008, hal.159). Bali dalam proyek *balinisasi* diwacanakan sebagai tempat yang indah, kaya akan budaya dan alamnya, masyarakat yang digambarkan ramah dan terbuka dengan kehadiran wisatawan, damai, dan menarik karena adat istiadat, serta upacara keagamaan yang kerap dilakukan sebagai ciri primadona dari Indonesia.

Namun, penggambaran Bali yang sedemikian rupa, membuat tak banyak yang memperhatikan detail bagian dari budaya Bali yang justru terkesan ‘angkuh’ terhadap aturan kedamaian dunia, persamaan hak asasi manusia dan hanya berpijak pada etnosentrisme budaya lokal guna mempertahankan identitasnya melalui atribut budaya seperti pengukuhan sistem kasta.

Kasta merupakan sebuah tradisi yang mengelompokkan masyarakat hindu di Bali. Sistem yang membagi masyarakat kedalam struktur-struktur sosial ini juga membedakan Bali dengan daerah-daerah lainya di Indonesia. Kasta umumnya merujuk pada bentuk kaku dari sistem stratifikasi yang ditandai oleh strata sosial endogenous dalam perkawinan, yang mempraktekkan penolakan ritual terhadap susunan dan tidak memungkinkan adanya mobilitas (Dwipayana 2001, hal. 45). Akibatnya, sistem kasta akan menentukan strata seseorang dalam jangka waktu yang panjang di lingkungan sosialnya. Mengenai konsep kasta, kadangkala pemahaman diarahkan pada ‘kenyataan sebenarnya’ yang harus dilanggengkan sebagai sebuah identitas .

Seiring berjalanya waktu, warisan budaya Bali ini, diaplikasikan dan dipahami sebagai sumber konflik sosial masyarakat Bali. Konsepsi yang ‘keliru’ ini dianggapkan sebagian masyarakat sebagai wujud dari kepentingan beberapa kelompok untuk menguasai kedudukan sosial yang bisa dengan mudah didapatkan dari kelahiran (*wangsa*).

Istilah kasta yang lekat kaitanya dengan agama Hindu ini, berangkat dari kata warna yang berasal dari *vri* yang artinya memilih lapangan kerja yang ditentukan oleh *guna* dan *karma* (Wiana n.d.). Secara garis besar, kasta akan membagi kelompok sosial masyarakat kedalam empat bagian, yaitu: *Brahmana* (ahli keagamaan), *Ksatria* (ahli pemerintahan), *Waisya* (ahli dagang), dan *Sudra* (ahli pertanian dan buruh) dengan dua tingkatan struktur, yaitu *Triwangsan* dan *Sudra*.

Pembagian tersebut sesuai dengan yang dituliskan dalam *Yajur Weda XXX.5* sebagai berikut:

*Brahmane brahmanam, Kshtariya rajanyam  
Manudbhyo Vaishyam  
Tapase Sudram*

Artinya:

Tuhan (dalam agama Hindu disebut *Ida Sang Hyang Widi*) telah menciptakan kaum *Brahmana* untuk pengetahuan, *Ksatria* untuk perlindungan, *Waisya* atau *Waisya* untuk perdagangan, dan *Sudra* untuk pekerjaan jasmani (Wirawan 2012).

Sehingga, konsepsi menurut ajaran agama Hindu, justru tidak mengedepankan kasta sebagai bagian dari sistem *wangsa* atau keturunan. Melainkan, merupakan sistem yang dipercayai diciptakan Tuhan (*Ida Sang Hyang Widi*) sebagai pembagian profesi. Meminjam istilah *sadaacara* dalam *Manawa Dharmasastra II.18* yang berarti kebenaran tertinggi seharusnya berasal dari *weda* (Wiana 2006, hal.14). Sehingga, sistem kasta seharusnya diamalkan berdasarkan yang tersurat di *weda*.



Sejarahnya, kasta berkaitan erat dengan pembagian *warna* (profesi) atau catur warna. Politik *devida et impera* (politik pecah belah) pada zaman Belanda yang dilakukan untuk kepentingan politis memecah belah masyarakat merupakan mula dari sistem ini. Kasta kemudian berevolusi menjadi pembagian atas dasar keturunan yang dipercayai hingga saat ini di Bali. Meminjam istilah dalam sosiologi, kasta kini menjadi *ascribed status* atau status yang diperoleh karena kelahiran seseorang (*wangsa*). Kasta di Bali akan mudah terlihat dalam nama yang diturunkan ketika mereka baru dilahirkan dilingkungan keluarga tersebut. Semisal, nama *Ida Ayu* dan *Ida Bagus* untuk golongan *Brahmana*. *Anak Agung, Cokorda, I Gusti*, untuk golongan *Ksatria*. *I Dewa Bagus dan I Dewa Ayu* untuk golongan *Waisya*. Serta terakhir *Putu, Made, Komang, Ketut dan Wayan* untuk golongan *Sudra*. Selain itu, pemberian panggilan *Ratu* yang berasal dari kata “*ra*” yang berarti dihormati dan “*tu*” yang berarti orang kepada kasta *Brahmana*.

Sistem kasta tidak berjalan dan dikukuhkan tanpa perdebatan dan konflik. Seperti pada tahun 1925, terbit sebuah koran Surya Kanta di Singaraja tepat disaat Belanda menjajah Indonesia. Keberadaan koran ini adalah untuk menyuarakan kesetaraan hak masyarakat Bali tanpa membedakan kasta. Surya Kanta, yang diredakturi kaum *Sudra* terpelajar, sangat kritis terhadap adanya perbedaan kasta dan hak istimewa kasta, serta mengkritik pemerintah kolonial yang menyokong sistem itu. Koran ini mendesak penyederhanaan upacara agama untuk meringankan beban

ekonomi orang Bali biasa, dan menuntut demistifikasi pengetahuan agama untuk mengurangi kekuasaan sosial religius yang berlebihan pada Pedanda. Akhirnya koran ini menyerukan pelanggaran dalam hubungan sosial khususnya dalam bahasa, busana, dan aturan perkawinan lintas kasta. (Robinson 2006 dalam Abraham n.d.).

Selain Surya Kanta, beberapa tahun terakhir, perdebatan berkepanjangan mengenai kasta kembali bermunculan. Sederet tokoh dan sastrawan asal Bali telah memberikan kritiknya terhadap eksistensi kasta di zaman modern melalui karya tulisannya. Seperti dari kalangan tokoh wartawan senior Bali I Putu Setia dalam tulisan berjudul “Kasta Kesalahan Berabad-Abad”, sastrawan Nyoman Rasta Sindhu dengan buku berjudul “Ketika Kentongan dipukul di Bale Banjar”, Putu Wijaya dalam novel “Bila Malam Bertambah Malam” yang mengungkap kasta sebagai sesuatu yang berlawanan dengan harkat manusia, serta Oka Rusmini dalam prosanya yang terkenal yaitu “Tempurung”, “Sagra”, dan “Tarian Bumi” yang menjelaskan sisi gelap kasta (Wirawan 2012). Untuk menggambarkan perbedaan signifikan dalam pandangan mengenai seseorang yang lahir dari kasta yang lebih tinggi peneliti mengutip salah satu dialog perempuan Bali dalam novel Tarian Bumi karya Oka Rusmini dalam, yaitu:

*“Karena dia seorang putri Brahmana, maka para dewa memberinya taksu, kekuatan dari dalam yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Alangkah beruntungnya perempuan itu, sudah bangsawan, kaya, cantik lagi. Dewa-dewa memang pilih kasih.” (Dalam Pratiwi 2008).*

Sistem kasta dipahami sinikal sebagai hak-hak sebagian masyarakat berdasarkan keturunan yang dapat digunakan untuk mendominasi dan memperoleh penghormatan dalam lingkungan sosialnya. Dari dialog tersebut kasta memunculkan sinisme dan konflik di internal masyarakat Bali. Hingga, perempuan dalam dialog tersebut, mengatasnamakan ketidakadilan Tuhan dalam menciptakan manusia. Padahal, jika dikaitkan lagi dengan kesusastraan agama Hindu, di *Bhagawad Gita* IV.13 menyatakan bahwa cara menentukan *catur warna* (awal kemunculan *kasta*) sebagai berikut (Mantra dalam Wiana 2006, hal.12):

*Catur-varnyam maya srstam  
Guna-karma-vibhagasah  
Tasya kartanam api mam  
Viddhy akartaram avyayam.*

Artinya : *Catur warna* aku ciptakan berdasarkan *guna* (kegunaan) dan *karma*(hasil perbuatan). Meskipun aku sebagai penciptanya, aku mengatasi gerak dan perubahan.

Melalui beberapa kesusastraan tersebut, dipahami bahwa *catur warna* yang kini diadaptasi menjadi sistem kasta, sebenarnya bukan berasal dari keturunan (*wangsa*), melainkan dari *guna* (kegunaan) dan *karma* (amal ibadah). Sehingga, sistem warna ini dipandang sebagai kewajiban bukan hak-hak terlebih dahulu (Tjokorda Rai Sudharta dalam Wiana 2006). Namun, kesalahpahaman ini justru dibiarkan berkembang dan kemudian mengikat sistem religi di Bali. Dalam kenyataanya, konflik akibat kasta tidak hanya terikat dan terbatas pada susunan kelompok sosial dan bagaimana masyarakat Bali dalam melakukan aktivitas

sosialnya. Kasta kerap kali menjadi sumber konflik internal di masyarakat Bali, sebagai contoh adalah adanya larangan tidak tertulis yang dilanggengkan untuk perkawinan beda kasta.

Perkawinan beda kasta merupakan bentuk dari modifikasi budaya Bali. Perkawinan beda kasta menimbulkan polemik karena ketakutan masyarakat (terutama yang berkasta *triwangsa*) untuk hidup dalam kesulitan yang kerap di dialogkan oleh pihak keluarga. Biasanya, keluarga akan memberitahukan bagaimana “samsara” atau sengsaranya jika hidup dalam perkawinan beda kasta. Semisal, jika pihak yang turun kasta adalah perempuan, maka ia dianggapkan tidak lagi ada dalam silsilah keluarga.

Konsep perkawinan merupakan salah satu bentuk hubungan interpersonal tahapan dari *committed romantic relationship* yaitu *marriage*. Hakikat perkawinan menurut undang-undang pokok perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Di Indonesia, sistem perkawinan yang dominan adalah patrilineal, atau wanita mengikuti suami ketika menikah. Perkawinan di Indonesia secara sah di catat di kantor urusan agama dan kantor catatan sipil dimasing-masing daerah.

Individu yang terikat dalam status perkawinan, akan lebih rentan terlibat konflik. Mengutip pernyataan dari Bernard Weise dan Urban Steinmetz (2013) “Ketidaksesuaian pendapat tak terelakkan dalam suatu pernikahan dan kehidupan

keluarga. Kadangkala, masing-masing pribadi dapat menjadi pesaing seperti juga penolong dan pelengkap bagi pasangannya...” (dalam Setyawati 2013). Melalui uraian tersebut, maka konflik menjadi suatu hal yang wajar terjadi. Karena, dasar dalam perkawinan (*marriage*) adalah dinamika komunikasi, konflik dan komitmen yang harusnya dipahami semenjak awal perkawinan (Stanley 2002, hal. 659).

Konflik dalam perkawinan menjadi menarik untuk diteliti, mengingat perkawinan merupakan bagian dari *romantic relationship* yang memiliki keunikan sebagai sebuah hubungan yang tercipta dan berlanjut oleh orang-orang yang ‘unik’ dan tidak bisa digantikan. Sternberg (1986) setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, berhasil menjabarkan tiga dimensi (*triangle of love*) dari *romantic relationship* yang kemudian menentukan fase cinta, yaitu: 1) *Passion* yang berkorelasi dengan perasaan positif dan keinginan yang kuat kepada seseorang, 2) *Commitment* yaitu alasan untuk tetap terlibat dalam sebuah hubungan yang erat kaitanya dengan investasi hubungan, 3) *Intimacy* atau perasaan akan kedekatan, keterkaitan, dan kelembutan hati (Wood 2004, hal.277-279).

Setelah menjalani proses konflik, beberapa pasangan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan pertimbangan seperti cinta, kepercayaan dan kenyamanan antara satu dengan lainnya (Wood 2004, hal. 309). Begitu pula yang terjadi dalam perkawinan suami istri beda kasta di Bali. Konflik yang terjadi akibat pertentangan perkawinan beda kasta dengan alasan ketakutan susunan keluarga akan berantakan,



ataupun kehormatan yang akan hilang telah berhasil dilalui oleh pasangan yang berani menikah walaupun berbeda kasta.

Padahal, sebagaimana memang pasangan suami-istri atau yang nantinya akan lebih tepat disebut ayah dan ibu, akan memiliki nilai penting yang bersifat ekonomis, politis, dan spiritual yang sangat besar yang harus dipertanggungjawabkan setelah menikah (Geertz 1992, hal.165). Namun, sistem kasta seakan menanggukkan tanggung jawab moral ini demi mengedepankan nilai identitas Bali melalui penguatan kasta.

Kompleksnya sistem kasta akan nampak dalam tradisi orang berkasta *Triwangsa (Brahmana, Ksatria dan Waisya)* yang tidak boleh melakukan perkawinan jika pasangannya berbeda kasta atau posisinya lebih rendah. Hal itu sempat tercatat dalam Paswara 1927 yang mempunyai kekuatan memaksa untuk tidak menikah jika bukan dengan *wangsasederajat*. Namun kemudian di cabut oleh keputusan DPRD Bali di tahun 1951 (Sudantra 2005 dalam Syanita 2010). Walaupun hukum sah tentang larangan perkawinan beda kasta telah di cabut, namun larangan ini masih tetap berlaku.

Nyoman Naya Sujana (2001) membagi masyarakat ke dalam dua kelompok tertentu, yaitu masyarakat dari kelompok “homo-aequalist” yaitu kelompok manusia yang memandang semua manusia yang sama dan setara, tidak ada tingkatan hirarki

dan kelompok 'homo-hierarchicus' yaitu kelompok manusia yang memandang bahwa hakikat posisi manusia terbagi atas beberapa tingkatan struktur sosial yang mana menganggap bahwa satu manusia akan berbeda dari manusia lainnya, memperlihatkan dilematis yang terjadi akibat kasta di Bali. Nyoman Naya Sujana melihat kasta berpotensi menghadirkan kotak-kotak perbedaan yang menciptakan diskriminasi. Sehingga, situasi yang dimunculkan akibat kasta tidak mengkondusifkan masyarakat Bali.

Diskriminasi didasarkan oleh variasi bentuk identitas berupa aturan dan organisasi tertentu. Diskriminasi kerap dilakukan dengan memberikan stereotipe atau prasangka yang ditunjukkan untuk menyingkirkan, menjauhi atau membuka jarak baik fisik ataupun mental (Liliweri 2002, hal. 93). Kondisi manusiawi ketika diskriminasi dilakukan oleh seseorang dengan tingkatan kekuasaan atau kepemilikan lebih tinggi (*triwangsa*) kepada masyarakat dengan tingkatan yang lebih rendah (*sudra*).

Kekonsistenan Bali yang masih menganut sistem kasta, menghadirkan polemik yang dilematis. Manakala posisi laki-laki dalam sistem kasta ini akan mempengaruhi posisi dari pasangan perempuannya, karena sistem patrilineal. Ketika seorang laki-laki *triwangsa* menikahi perempuan dari kasta *sudra*, maka perempuan tersebut akan mendapatkan gelar *Jero*. Menurut Artika dalam Sarad Mei 2000 no 5 Th. I, perempuan yang mendapatkan gelar *Jero* sebenarnya menandakan ketidakrelaan kultural dalam menerima orang yang bukan dari kalangan *triwangsa* ke

dalam kelompok *triwangsa* (dalam Pratiwi 2008, hal. 8). Namun, ketika perempuan berkasta *triwangsa* menikah dengan laki-laki dari kasta *sudra* (*nyerod*), maka gelar bangsawan dari perempuan akan dicabut melalui prosesi *mepati wangi*.

Melalui penggambaran tersebut, terbayang bagaimana sistem kasta di Bali mengikat masyarakat terutama mengenai “kelayakan” pasangan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan. Sehingga, konflik yang terjadi akibat perkawinan beda kasta ini, tidak dapat dielakkan. Konflik dalam konteks ini tidak hanya melibatkan internal pasangan tersebut, tetapi juga pihak eksternal yaitu keluarga besar masing-masing pasangan.

Peneliti merupakan perempuan Bali keturunan kasta *Brahmana*. Peneliti memposisikan dirinya sebagai masyarakat Bali yang modern yang berpikiran terbuka terhadap persamaan hak manusia untuk dipandang setara. Karena, peneliti tidak setuju terhadap keberadaan sistem kasta yang ada yang masih ada di Bali yang tidak sesuai dengan sistem hak asasi manusia. Seperti dalam *charter of united nations* atau piagam perserikatan bangsa-bangsa ditahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang berisikan hal sebagai berikut (Wirawan 2012):

*The achieve international cooperation in solving international problem of an economic, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.*

Isi piagam perserikatan bangsa-bangsa memperlihatkan bahwa sistem kasta justru “melawan” HAM secara universal. Melalui kasta, susunan sosial masyarakat Bali dibedakan menjadi empat *wangsa* yaitu *brahmana*, *ksatria*, *waisya* dan *sudra* yang mengkotak-kotakan manusia kedalam tingkatan sosial.

Djamil dalam Salim (2006, hal.240) menyatakan bahwa loyalitas lokal (*local loyalty*), hubungan kekerabatan (*kindship solidarity*) dan hubungan yang berhubungan dengan status tradisional (*traditional-status relations*) yang mengungkung sebuah masyarakat di dalam budaya, yang bisa dipadankan untuk memberikan gambaran tentang situasi masyarakat di Bali. Mengingat, pertentangan akan perkawinan beda kasta di Bali sampai saat ini masih dilanggengkan.

Peneliti menggunakan padangan kritis dalam melihat fenomena kasta di hubungan perkawinan di Bali. Karena, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimanakah isu yang timbul akibat langgengnya sistem ini. Kemudian membahasnya lebih mendalam dengan mengaitkannya melalui strategi penyelesaian yang digunakan pasangan suami istri beda kasta. Diharapkan, melalui penelitian ini peneliti dapat memberikan referensi ilmiah sebagai acuan penolakan pengukuhan sistem kasta di Bali.

Sebelumnya, penelitian mengenai kasta juga pernah dilakukan oleh Dara Windiyarti (2008) yang melihat fenomena yang sama dalam konteks novel Tarian

Bumi karya Oka Rusmini. Ia menyimpulkan bahwa sistem perkastaan di Bali yang hierarkis dan patriarkis membawa dampak-dampak negatif pada kaum lemah, yaitu kelas *sudra* dan kaum perempuan. Diskriminasi kelas menurutnya sangat terlihat jelas, dari pembagian peran, status dan posisi antar kelas yang berkuasa yaitu *brahmana* dan kelas yang tidak memiliki kuasa yaitu *sudra*.

Adapula penelitian mengenai konflik dalam rumah tangga oleh Cherni Rachmadani (2013) yang menyatakan dalam pernikahan sering kali terjadi perbedaan diantara keduanya yang biasanya diwujudkan dalam konflik, pertengkaran atau perdebatan. Banyak hal bisa menjadi sumber konflik dan menyebabkan sebuah persoalan dalam rumah tangga. Bahkan masalah yang seharusnya tidak diributkan pun bisa menjadi persoalan besar yang tak kunjung selesai. Dari penelitian ini, peneliti melihat bahwa konflik yang terjadi dalam konteks rumah tangga, akan lebih kompleks dan menarik untuk diteliti. Terlebih dalam sebuah ikatan perkawinan akan ada pihak lain selain pasangan tersebut, yaitu keluarga pasangan yang ikut berperan dalam memunculkan konflik. Dari pernyataan penelitian ini pula, peneliti melihat bahwa peran keluarga tidak hanya dalam tataran pendukung konflik, tapi asal mula konflik tersebut. Namun, perlu di tekankan bahwa faktor diluar pasangan seperti keluarga, budaya, dan masyarakat hanyalah faktor pendukung terjadinya konflik. Faktor ini kemudian hanya akan menjadi pertimbangan sikap bagi pasangan suami istri dalam menentukan solusi atas konfliknya.



Mengutip pernyataan Noller (1995) mengenai hubungan keluarga asal dan bagaimana individu terlibat dalam sebuah konflik dan menyelesaikannya adalah sebagai berikut:

*How the persons communicate during conflict in their close interpersonal relationships and the impact that conflict has on these relationship is largely a function of how this persons have learned to deal with conflict in their families of origin* (Koerner 2002, hal. 235).

Jika dikaitkan dengan konteks kasta, maka keluarga asal yang memiliki latar belakang kasta yang berbeda akan pula mempengaruhi individu tersebut menyelesaikan konfliknya.

Penelitian berikutnya adalah mengenai strategi manajemen konflik pasangan suami-istri, yang dilakukan oleh Hertyantiputeri (2009) menyatakan bahwa perkawinan tidak akan terhindar dari konflik. Mengutip dari Sadarjoen (2005) dalam penelitian ini, bahwa perkawinan merupakan landasan natural untuk berkembangnya suatu konflik, karena setiap individu tanpa terelakkan memiliki pengamatan dan harapan-harapan yang berbeda secara individual. Oleh sebab itu, pasangan akan memiliki strategi masing-masing dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Mengingat bahwa konflik lebih berpotensi menghasilkan hal negatif, terutama dalam hubungan interpersonal, maka penelitian tentang strategi manajemen konflik sangat penting dilakukan dalam ranah ilmu komunikasi. Karena, *“conflict define as communication that shows a struggle between two independent parties over goals*

*they perceive to be incompatible or resource they perceive to be scarce.*” (Dumlao and Botta 2000, hal. 174).

Melalui komunikasi yang baik, maka kita dapat menyelesaikan konflik tanpa ujung perpisahan. Dalam konflik di hubungan interpersonal, pertimbangan perbedaan masing-masing individu dalam memandang konflik dan cara mereka menyelesaikan permasalahan menjadi pokok evaluasi bagaimana pemahaman mengenai strategi manajemen yang baik dalam menangani konflik.

Penelitian ini berfokus pada strategi manajemen konflik pasangan suami-istri beda kasta di Bali. Peneliti melihat bahwa, penelitian mengenai tema ini masih jarang dilakukan. Sebab, tema penelitian mengenai kasta di Bali masih menjadi isu yang sensitif untuk di bahas. Pada penelitian, peneliti hendak mengetahui strategi manajemen konflik apa yang digunakan pasangan suami-istri beda kasta dalam menyelesaikan konflik di dalam perkawinannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kompleksitas sistem kasta yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Bali seringkali menimbulkan konflik terutama dalam hubungan percintaan, menimbulkan ketidakadilan dan perasaan terdiskriminasi bagi beberapa kalangan atau kelompok yang lemah (*sudra*). Perdebatan antara pengukuhan identitas Bali dengan pengamalahn nilai universal dari kesetaraan hak asasi manusia menjadi

dipertanyakan. Sehingga, pada penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

*Bagaimanakah penyelesaian konflik pasangan suami istri beda kasta di Bali berdasarkan isu-isu konflik yang muncul dari perkawinan tersebut?*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplor strategi manajemen konflik pasangan suami istri beda kasta di Bali dalam lingkup konflik yang berlatar sistem kasta di Bali.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah refensi penelitian di bidang Ilmu Komunikasi khususnya dalam kajian strategi manajemen konflik, memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem kasta ‘bekerja’ dalam konteks perkawinan di Bali.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan informasi dan pengetahuan untuk menjadi landasan pengetahuan dan sikap terhadap kelanggengan sistem kasta di Bali.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

### 1.6 1.5.1 Konflik dalam Hubungan Interpersonal

Hubungan interpersonal, yang melibatkan dua individu atau lebih dalam proses komunikasi yang berpotensi mengubah hubungan yang semula bersifat impersonal menjadi personal, memungkinkan memunculkan konflik.

Konflik dalam hubungan interpersonal (*interpersonal relationship*) menurut Julia T. Wood terjadi ketika individu mempertahankan pandangan yang berbeda, kepentingan, atau tujuan dan meletakkanya di posisi yang tidak sesuai dengan yang lainnya atau berlawanan (Wood 2004, hal.241). Hocker dan Wilmot (1991) mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan yang dinyatakan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak selaras, ganjaran yang langka, dan gangguan-gangguan dalam mencapai tujuan mereka (dalam Tubbs 2000, hal.221).

*“People first learn about how conflict work and how to resolve interpersonal problems with their familie”* (Noller dalam Dumlaio and Botta 2000, hal 175). Maka dari itu, konflik menjadi wajar terjadi dalam tahapan hubungan romantic relationship. Peterson (1983) menyatakan *“conflict is an*

*inevitable, natural process in important romantic relationship*” (Pistole 2003, hal.319).

Julia T Wood (2004) menyatakan beberapa prinsip konflik di hubungan interpersonal, antara lain: 1) *Conflict as a natural process in all relationships* yang menegaskan kewajaran terjadinya konflik di dalam hubungan, 2) *Conflict may be overt and covert* yang menegaskan bahwa orang-orang yang terlibat di dalam konflik akan mengekspresikan ketidaksamaanya secara terbuka dan eksplisit (*overtly*) atau tertutup dan insplisit (*covertly*), 3) *conflict behavior and meanings are shaped by social locations* yang menekankan bahwa kultur akan mempengaruhi bagaimana individu-individu yang terlibat konflik akan memaknai konflik yang terjadi, kultur dalam konteks ini akan dipengaruhi juga oleh kelompok sosial, letak geografis dan perbedaan gender, 4) *conflict can be good for individuals and relationships* yang menekankan bahwa konflik akan menumbuhkan pengertian dan pemahaman dari masing-masing individu yang sedang berkonflik (Wood 2004, hal.248).

#### ***1.5.1.1 Style of conflict***

*“Conflict style offer general expectations about how the conflict should be approached and convey a general attitude about both parties in conflict”* (Dumlao and Botta 2000, hal. 176-177).



Julia T. Wood (2004) menjelaskan beberapa orientasi dari konflik yang terjadi, antara lain: 1) *Lose-Lose*, merupakan orientasi dengan tidak memenangkan pihak yang sedang berkonflik, jenis penyelesaian ini membawa hubungan menuju kehancuran atau perpisahan, 2) *Win-Lose*, merupakan orientasi dengan mengibaratkan penyelesaian konflik itu merupakan arena pertarungan dimana hanya muncul satu pemenang ditiap pertarungan, dalam orientasi ini ditandai dengan adanya kultur individualis, *self-assertion*, dan jiwa berkompetisi yang tinggi, 3) *Win-Win*, orientasi ini mengarahkan penyelesaian konflik dengan memperhitungkan kepuasan (*satisfaction*) dari masing-masing individu yang berkonflik dengan mengakomodir penyelesaian konflik yang adil.

#### **1.5.1.2 Strategi Manajemen Konflik**

*“Conflict manajemen has been shown to be associated with the overall quality of interpersonal relationships, relationship satisfaction, as well as attribution about the partner and the relationships”* (Finchan &Bradbury dalam (Dumlao and Botta 2000, hal. 174). Sehingga, melalui strategi manajemen konflik yang digunakan oleh individu ketika berkonflik, maka pola hubungan dan kepuasan dari pasangan akan terdeksripsikan.

Menurut DeVito (2007, hal. 296-201) strategi manajemen konflik terbagi ke dalam beberapa kategori, yaitu :

**a. *Win-lose and Win-Win Strategies***

*Win-losestrategies* menitik beratkan pada pertenggaran aktif, yang mana satu pihak akan menang dan satunya akan kalah. Sedangkan, untuk *win-winstrategies* mengarahkan permasalahan pada solusi.

**b. *Avoidance and Active Fighting Strategies***

*Avoidance* mengacu pada strategi yang dipergunakan ketika seseorang dalam menyelesaikan masalah memilih untuk menghindari dari konflik atau menunda penyelesaian konflik sampai menemukan pendapat logis. Salah satu contoh dari *avoidance* adalah *nonegotiation* atau ketika individu menghindari diskusi dan mendengarkan penjelasan dari pasangan. Ada lagi strategi yang tidak produktif yaitu *silencers*. Biasanya strategi ini digunakan untuk membuat pasanganya terdiam, contoh: menangis ketika berkonflik.

**c. *Force and Talk Strategies***

Dalam strategi manajemen konflik ini, individu berusaha mencari jawaban atas permasalahan yang sedang terjadi, bahkan dengan cara memaksa. Strategi ini menekankan pada “apa yang sesungguhnya ada” pada mereka (pihak yang berkonflik), dan bagaimana pasangannya memahami pernyataan mengenai perasaan tersebut. Tekanan bisa dikategorikan baik emosi ataupun fisik. Satu-satunya alternatif untuk menekan adalah berbicara atau *talk*. Namun dibutuhkan keterbukaan, rasa positif dan empati atas pasangan dan konflik yang terjadi. Adapun beberapa saran untuk lebih efektif dalam mendengar dan berbicara adalah:

- *Act the role of the listener* yang berarti berlaku dan berpikirlah sebagai pendengar yang baik. Pastikan pemahaman atas apa yang disampaikan pasangan terhadap konflik.
- *Express your support and empathy* yang berarti pahami dan rasakan apa yang pasangan rasakan dan katakana.
- *State your though and feelings* yaitu katakana apa yang menjadi opini dan perasaan kepada pasangan.

***d. Face destracting and face enchancing strategies***

Strategi *face destructing* adalah keadaan dimana individu merasa dirinya “lebih” dari pasangannya, yang mengakibatkan pernyataan pasangannya mengenai konflik tersebut tidak bermutu untuk dipertimbangkan. Strategi ini juga disebut sebagai *face-attacking*.

Strategi *face enchancing* yaitu individu berusaha menyelesaikan masalahnya dan membantu pasangannya untuk tetap terlihat positif di depan orang lain diluar konflik tersebut.

***e. Verbal agressiviness and Argumentativeness***

*Verbal agressiviness* adalah strategi ketika individu yang berkonflik, menggunakan kelemahan pasangannya untuk menekan dan memenangkan konflik. *Verbal agressiviness* ini menimbulkan *argumentativeness* adalah strategi yang menekankan kecenderungan seseorang untuk diam dan pasrah, kemudian memilih untuk tidak menyampaikan pendapatnya terkait konflik.

***1.5.2 Committed Romantic Relationship***

“*Love relationships are a central component of late adolescent, young adult development*” (Chickering & Erickson dalam Pistole 2003, hal. 318). Sehingga, menjalin sebuah hubungan percintaan merupakan hal yang wajar

terjadi di hubungan orang dewasa. Biasanya pada hubungan yang terjadi pada orang dewasa, akan terjalin komitmen untuk melanjutkannya ke tahapan yang lebih serius.

Komitmen, merupakan bagian dari *committed romantic relationship*. *Committed romantic relationship* terjadi diantara dua individu yang sifatnya tidak bisa tergantikan (Wood 2004, hal.294). Sementara dalam berbagai hubungan interpersonal lainnya, pasangan dapat mudah digantikan. Ketidakmudahan menggantikan posisi pasangan sebelumnya, merupakan cerminan dari karakteristik hubungan *committed romantic relationship* yang erat kaitanya dengan *romantic* dan *sexual feelings*.

*“Committed romantic relationship are relationship between two individuals who assume they will be primary and continuing parts of each other’s lives”* (Wood 2004, hal.277). Maka, *committed romantic relationship* bisa dikatakan sebagai tahapan hubungan yang serius dalam kehidupan manusia.



### **1.5.2.1 Tahapan Hubungan dalam Romantic Relationship**

*Menurut DeVito (2007) proses pengembangan hubungan interpersonal, dimulai dari tahapan perubahan hubungan yang bersifat impersonal menuju ke hubungan interpersonal. Melalui tahapan-tahapan tertentu individu akan mengembangkan hubungannya ke tahapan yang lebih intimate.*

Tahapan yang dilakukan individu untuk membangun hubungan tersebut, dikonstruksi oleh Knapp ke dalam *Knapp Model of Relationship Stage* yaitu (Knapp dalam DeVito 2007, hal.226) :

**Stage 1 Initiation** : Tahapan awal dimana individu memperkenalkan dirinya masing-masing dan jika ada ketertarikan, maka hubungan akan berlanjut dengan komunikasi yang rutin.

**Stage 2 Experimenting** : Tahapan ini individu yang telah berkomunikasi secara rutin tersebut saling mengetahui karakteristik satu sama lainnya.

**Stage 3 Intensifying** : Setelah lama berkomunikasi rutin, individu mulai mengetahui karakter, kemudian hubungan berlanjut menjadi lebih intim.

**Stage 4 Integrating** : Dalam tahapan ini, individu mulai untuk saling ketergantungan, dan mempertambah tingkat keintimanya.

**Stage 5 Bonding** : Dalam tahapan ini, individu telah mensosialisasikan hubungan mereka kepada publik disekitarnya dan melakukan *social bonding*.

Tahapan yang dikemukakan oleh Knapp ini, dapat dilihat bahwa inti dalam membangun sebuah hubungan adalah komunikasi. Peran komunikasi yang intensif membantu individu untuk merubah hubungan yang semula bersifat impersonal dai tahapan 1 (*Initiation*) menuju tahapan 5 (*Bonding*).

Peneliti menambahkan pandangan dari DeVito (2004, hal. 236-244) mengenai 6 tahapan dalam membangun hubungan interpersonal, yaitu:

1. **Contact**, yaitu ketika individu mulai mengenal pasanganya dimulai dari gambaran fisik yang kemudian berlanjut dengan komunikasi yang bersifat personal.
2. **Involvement**, pada tahapan ini, individu mulai menguji dan mencoba untuk belajar mengetahui satu sama lain lebih jauh. Pada

tahapan ini, individu mulai melakukan *testing* dan *intensifying* (pembukaan diri).

3. ***Intimacy***, tahapan ini memungkinkan individu untuk semakin intim dikarenakan kepuasan akibat kejujuran dan keterbukaan satu sama lainnya.
4. ***Detoriation***, tahapan dimana individu dalam hubungan tersebut melemah dengan munculnya ketidakpuasan individu terhadap hubungannya. Hal ini terjadi ketika tahapan *intimacy* tidak bisa dijaga lagi.
5. ***Repair***, tahapan individu menganalisa permasalahan yang terjadi dan mencoba mencari solusi.
6. ***Dissolution***, tahapan individu untuk berpisah. Tahapan ini merupakan akibat dari ketidakmampuan individu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

### ***1.5.3 Kasta dalam Hindu***

Kasta memiliki sejarah panjang untuk mencapai kedudukannya saat ini. Kasta berasal dari kata Portugis yang artinya warna atau profesi. Hassan sadely menyebutkan bahwa sistem kasta sebagai model struktur kelas tertutup

yang ketat (Dwipayana 2001, hal. 45). Kasta akan berhubungan erat dengan kelahiran atau keturunan.

Anak Agung Gde Putra Agung (2001) melalui bukunya *Perubahan Struktur Sosial dan Pertentangan Kasta di Bali Utara* mencatatkan definisi mengenai kasta dari sebuah kamus, yang mengatakan bahwa kasta berasal dari bahasa latin *castus* yang berarti “utama”, “suci”, “tak bernoda”, “murni”, “sopan”, “terhormat” (dalam Pratiwi 2008, hal. 15). Selanjutnya, kasta digunakan oleh bangsa Belanda untuk melakukan politik *divide et impera* yang membagi struktur sosial masyarakat kedalam kelompok-kelompok yang tujuan politisnya adalah untuk memecah belah masyarakat tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Nyoman Wijaya dalam *Seminar Seni Sastra Budaya Faksas Unud* yang memandang kasta sebagai hal yang sangat penting dalam perubahan kebudayaan di Bali. Ia menyatakan bahwa kasta digunakan oleh Belanda untuk menjaga kedudukannya pada masa itu (dalam Pratiwi 2008, hal.16).

Menurut legenda yang dipercayai masyarakat Bali, Dang Hyang Nirartha (pendeta suci dari kerajaan Majapahit) merupakan orang pertama yang membawa sistem kasta di Bali. Melalui sistem kasta Dang Hyang Nirartha melakukan hegemoni kekuasaan kerajaan Majapahit hingga ke Bali. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa sistem kasta atau yang mirip

dengannya telah terjadi dalam beberapa masyarakat Hindu sejak 2000 silam (Sir Thomas Stamford Raffles dalam Dwipayana 2001, hal. 45). Sistem kasta Hindu di India melihat bahwa kasta berkembang dari sistem profesi yang dijalankan oleh seorang individu dan bukan sebuah sistem yang mengingatnya semenjak ia lahir.

Di kalangan masyarakat Hindu, kasta dibagi menjadi empat bagian (*varna*) secara tradisional yaitu :

1. ***Brahmana***, sebagai tingkat kedudukan tertinggi. Biasanya lahir dengan nama Ida Bagus atau Ida Ayu. Kemudian kasta ini berperan dalam bidang keagamaan
2. ***Ksatria***, tingkatan kedua kasta ini, awalnya merupakan kelompok raja-raja. Dimana ketika lahir memperoleh nama I Gusti, Cokorda atau Anak Agung.
3. ***Waisya***, sebagai tingkatan ketiga dalam catur kasta, *waisya* merupakan golongan pedagang. Dalam kelahirannya, biasanya memiliki nama I Dewa, Dewa Ayu, Dewa Bagus.
4. ***Sudra***, golongan terakhir dalam kasta ini seringkali disebut *nak jaba*. Merupakan golongan buruh, petani dan nelayan. Keturunannya akan memiliki nama I Putu/ Ni Putu, I Made / Ni



Made, I Komang/ Ni Komang, I Wayan/ Ni Wayan, I Ketut / Ni Ketut.

Awal pembagian kasta ini, sebenarnya bukan berdasarkan pada keturunan melainkan pada profesi seperti kasta di India. Namun, dalam perkembangannya, sistem kasta Hindu yang diadopsi oleh masyarakat Bali mengalami pergeseran menjadi ketimpangan sosial. Hal ini bertentangan dengan ujaran Nyoman Naya mengenai masyarakat Bali (*Balines[e] society*) yang sangat majemuk (plural), bukan hanya dalam sub-etnik melainkan juga pengelompokan sosial yang dibentuk oleh agama, serta berbagai golongan kepentingan yang hidup dalam masyarakat Bali (Sujana 2001, hal. 28). Masing-masing gelar yang ditambahkan dalam penamaan orang Bali ini, merupakan gambaran superioritas atau inferioritas kultural khusus yang bersangkutan dengan masing-masing tingkat kasta yang berjenjang-jenjang secara beragam (Geertz 1992, hal. 167).

Dahulu, sistem kasta di Bali memiliki dasar hukum yang tertulis dalam “Kitab Hukum Agama”, yang kemudian dijadikan acuan oleh Raad van Kerta (lembaga pengadilan kolonial) untuk membedakan hak-hak istimewa yang diperoleh kelompok kasta *Triwangsa* daripada *Sudra* (dalam Pratiwi 2008, hal. 17).

Terdapat dua pandangan mengenai kasta yang ada, yaitu : 1) Kasta itu berkaitan dengan sifat dan karakter seseorang, seperti yang banyak mengerti agama akan menjadi *Brahmana*, 2) Kasta itu merupakan simbol yang diwariskan melalui keturunan seperti semua orang *Brahmana* akan memiliki anak berkasta *Brahmana* (Sujana 2001, hal. 33).

Sejak perjalanan awal hingga langgenya sistem ini, kasta melahirkan budaya patriarki yang menimbulkan perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem kasta. Perempuan *triwangsa*nya boleh menikahi *semeton* (sodara laki-laki yang berasal dari kasta yang sama), bilamana perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang berkasta dibawahnya (*nak jaba*), maka status kebangsawannya akan di hilangkan baik secara langsung oleh keluarga besar dan tidak langsung melalui ritual keagamaan, *mepati wangi*. Pelanggaran ini disebut sebagai “Asu Pundung” dan “Alangkahi Karang Hulu” (Dwipayana 2001, hal.129). Pernikahan *nyerod* (turun kasta) ini, juga menyebabkan pihak keluarga perempuan tidak diijinkan untuk meminta makan di rumah anak perempuannya tersebut, dan konsekuensi lainnya adalah tidak diijinkanya anak perempuan yang *nyerod* ini untuk melihat jenazah orang tuanya saat meninggal.

Namun, jika pihak laki-laki *triwangsa* mengambil perempuan *jabawangsa* (*sudra*) maka itu diperbolehkan. Kemudian perempuan yang

dinikahi tersebut diberi gelar *Jero* yang bermakna istri tersebut berasal dari kasta yang lebih rendah dan ketidaksukaan pihak *Triwangsa* terhadap kedatangannya secara kultural di keluarga tersebut. Dalam prosesi pernikahan pasangan seperti ini, pihak keluarga laki-laki *triwangsa* tidak diwajibkan untuk hadir kerumah perempuan *jaba* itu, hanya diwakilkan dengan keris keluarga atau tiang rumah yang di adegankan memakai pakaian pengantin (Dwipayana 2001, hal. 129). Selain itu, ketika masuknya *Jero* di dalam sebuah keluarga *triwangsa* maka perempuan tersebut tidak diijinkan untuk *munggah banten* (menaikkan sesajian berupa banten ke pelataran persembahyangan).

Ini menunjukkan ketimpangan sosial akibat kasta tidak hanya terjadi antar kelompok masyarakat saja, melainkan antar laki-laki dan perempuan yang berada dalam kasta tersebut. Apa yang boleh dilakukan oleh laki-laki tidak boleh dilakukan oleh perempuan Bali. Padahal, seringkali perempuan yang menjadi sosok berpengaruh dalam lingkungan sosial seperti Banjar (sejenis RT/ RW), pura, desa adat dan keluarga besar. Akibat marginalisasi ini, hanya ada istilah *purusa* atau keturunan laki-laki sebagai pengakuan garis keturunan.

Kasta kemudian dianggap sebagai *paramount reality* atau kenyataan tertinggi dimana dunia kehidupan sehari-hari seperti yang dihadapi orang-

orang, menjadi tempat mereka bertindak, dan melalui dunia itu mereka hidup (Schultz dalam Geertz 1992, hal.152).

### ***1.5.3.1 Perkawinan menurut Hindu (Hindu Marriage)***

Perkawinan memiliki arti penting bagi manusia. Melalui perkawinan, maka tahap kehidupan baru telah dimulai. Sedemikian pentingnya sebuah perkawinan, maka tak sedikit orang yang menghabiskan banyak materi dan kesiapan mental dalam melakukan perkawinan.

Kartini Kartono (1992, hal. 224) menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami dan istri dipertemukan secara formal kepada pemuka agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian di sahkan menjadi sepasang suami-istri dalam upacara atau ritus-ritus tertentu.

Hakikat perkawinan menurut undang-undang pokok perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara pria dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan undang-undang

tersebut, maka seharusnya tidak ada pengkategorian seperti kasta yang membatasi dua orang yaitu laki-laki dan perempuan untuk menikah jika landasan dari perkawinan hakikatnya adalah kebahagiaan. Selaras dengan Hauck (1986) menyatakan bahwa perkawinan sebagai suatu perpaduan antara dua pribadi yang selalu dalam keadaan seimbang (dalam Setianti 2006, hal.64).

Menurut ajaran agama hindu yang tertulis dalam lontar *Agastya Parwa* disebutkan “Yaktha sakti kayika dharma” bahwa perkawinan atau *pawiwahan* bermakna kemampuan diri sendiri melakukan *dharma* (kebaikan) yang merupakan salah satu dari empat tujuan hidup manusia menurut ajaran agama Hindu yaitu *Artha, kama* dan *moksa (Catur Purusa Artha)*(dewata n.d.). Sehingga, jika dua orang manusia dalam ajaran agama Hindu melakukan perkawinan, mereka hanya dihadapkan pada janjinya kepada Tuhan (*Ida Sang Hyang Widhi Wasa*) dan tidak kepada manusia lainya.

Perkawinan menurut hukum Hindu dikatakan sah apabila mencakup beberapa aspek yaitu : 1) Apabila *wiwaha* (perkawinan) dilakukan oleh rohaniawan, 2) Apabila kedua mempelai menganut agama hindu, 3) Melakukan upacara *biakala* sebagai rangkaian perkawinan, 4) Sebelumnya tidak terikat dengan perkawinan lainya, 5)



Tidak ada kelainan seperti pernah menjadi kaum homoseksual, lesbian, dan tidak sehat jasmani dan rohani, 6) Umur minimal bagi laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 18 tahun, 7) Calon mempelai tidak memiliki hubungan darah dekat atau *sapinda*, 8) Upacara perkawinan dilakukan di rumah mempelai yang merupakan *purusa* (pawiwahan 2012).

Selain itu, dalam ajaran agama Hindu terdapat pula delapan jenis perkawinan menurut *Manawa Dharma Sastra* diantaranya: 1) *Brahma wiwaha* adalah pemberian anak perempuan kepada seorang pria ahli weda dan berperilaku baik dan diundang sendiri oleh ayah di perempuan, 2) *Daiwa wiwaha* adalah pemberian anak perempuan kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa, 3) *Arsa wiwaha* adalah perkawinan yang dilakukan karena atas dasar kebaikan keluarga, 4) *Prajapati wiwaha* adalah pemberian anak perempuan setelah berpesan dengan mantra dan seolah menunjukkan penghormatan kepada mempelai laki-laki, 5) *Asura wiwaha* adalah bentuk perkawinan dimana mempelai laki-laki memberi mas kawin menurut kemampuan dan keinginannya kepada mempelai perempuan, 6) *Gandharwa Wiwaha* adalah bentuk perkawinan karena dilandasi perasaan sama-sama suka diantara mempelai laki-laki dan perempuan,

7) *Raksasa wiwaha* adalah perkawinan yang memaksa dengan menculik mempelai perempuannya, dan 8) *Paisaca wiwaha* adalah perkawinan dengan cara menipu, mencuri, memaksa dan membuat bingung atau mabuk (pawiwahan 2012).

Penelitian ini menggunakan jenis perkawinan menurut Hindu yang *gandharwa wiwaha* atau perkawinan karena dilandasi perasaan sama-sama suka diantara mempelai laki-laki dan perempuan.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar penelitian ini mampu menghasilkan uraian secara mendalam tentang ucapan dan tingkah laku yang diamati dari suatu individu, kelompok, atau organisasi dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif (Kriyantono 2010). Sedangkan, tipe penelitian eksploratif digunakan peneliti karena penelitian ini merupakan penelitian baru mengenai Bali yang dikaji dalam lingkup komunikasi. Sehingga, melalui penelitian ini peneliti bertujuan untuk menggali (*explore*) secara luas mengenai strategi manajemen konflik oleh pasangan suami istri yang berakar dari permasalahan

sistem kasta dan budaya di Bali. Penelitian ini menggunakan paradig teori kritis, dengan alasan bahwa peneliti menempatkan kebenaran secara penuh pada objek penelitian. Karena, teori kritis memang diciptakan untuk memihak pada keadaan, kelompok, atau orang-orang tertentu, sesuai yang disukai oleh pengagasnya (Salim 2006, Hal.87)

### ***1.6.2 Sasaran Penelitian***

Sasaran dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri beda kasta di Bali. Beda kasta yang dimaksud adalah ketika salah satu informan merupakan laki-laki atau perempuan yang berasal dari kasta *triwangsa* (*Brahmana, Ksatria dan Waisya*) menikah dengan laki-laki atau perempuan dari kasta *Sudra* di Bali. Alasan pemilihan pola perkawinan seperti ini adalah isu konflik kerap muncul dari perkawinan antara orang dari kasta *triwangsa* dengan yang berkasta *sudra*.

Pemilihan informan dilakukan dengan cara *purposive* yang berarti informan dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dengan sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya. Informan dipilih berdasarkan kesesuaian mereka dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan peneliti serta berdasarkan kesediaan informan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Informan utama berjumlah empat pasang, serta dua orang lagi adalah informan pendukung. Empat pasang informan tersebut berasal dari latar

perkawinan beda kasta yang berbeda. Dua pasang dari perkawinan naik kasta, dan dua sisanya dari perkawinan turun kasta. Lokasi tempat tinggal informan juga divariasikan yaitu lingkungan dengan ciri perkotaan dan pedesaan.

### ***1.6.3 Unit Analisis Data***

Unit analisis dalam penelitian ini adalah narasi-narasi yang diperoleh dari hasil wawancara (*interview*) dengan informan. Narasi-narasi yang diperoleh dari hasil wawancara merupakan data yang berisi pernyataan verbal maupun non verbal informan (pasangan suami istri beda kasta di Bali) berkaitan dengan konflik dan strategi manajemen konflik yang digunakan.

### ***1.6.4 Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara (*indepth interview*) mengingat bahwa informan merupakan individu yang memiliki informasi terkait penelitian ini. Karena kelebihan wawancara seperti yang disampaikan Seidman (1991) adalah :

*Provide high credibility and flexibility because participants can describe what is meaningful or important to him or her by using his/her own words rather than being restricted to predetermined categories* (Wahyuni 2012, hal. 52).

Tipe wawancara yang digunakan adalah *semi structured interviews*.

*Semi structured interviewing normally starts with more general question or topics. Relevant topic (such as control are initially identified and the possible relationship between this topics and the issues such as distribution of control[]), become the basis for more*

*specific questions which o not need to be prepared in advance* (Wahyuni 2012, hal.55).

Oleh karena itu, peneliti tidak membatasi daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada objek penelitian, dan membebaskan mereka untuk mengekspresikan dirinya. Sebelumnya, peneliti juga telah mempersiapkan pengetahuan dan *guidline* awal terkait permasalahan. Ruane (1995) menjelaskan:

*At the beginning of the interview, we have to provide a good introduction to the respondent by giving necessary information which includes of : 1) the purpose of interview and the advantage for the respondent... 2) address terms of confidentially, 3) explain the format...,4) indicate how long the interview usually takes, 5) provide contact information of the interviewer, 6) allow interviewee to clarify any doubts about the interview* (Wahyuni 2012. Hal. 61).

Dari penjelasan tersebut, maka persiapan diawal wawancara menjadi penting untuk mempermudah proses selanjutnya. Setelah melakukan *in depth interview*, peneliti akan melakukan observasi untuk memperdalam hasil penelitian. Persiapan data awal berupa:

1. Data terkait strategi manajemen konflik yang berlaku untuk menyelesaikan masalah di hubungan interpersonal.
2. Data terkait sistem kasta di Bali, dan bagaimana bentuk konflik dan pertentangan yang terjadi akibat sistem tersebut.

Wawancara akan dilakukan kepada beberapa informan (utama dan pendukung), seperti:



1. Empat pasangan (suami dan istri) beda kasta di Bali
2. Pemuka agama di Bali

Selama penelitian, dituliskan poin-poin ujaran informan, dan merekam dialog wawancara.

#### ***1.6.5 Teknik Pengolahan Data***

Setelah melakukan *indepth interview*, peneliti akan melakukan proses penyaduran poin-poin yang relevan dengan tema dan tujuan penelitian. Kemudian, melakukan transkrip wawancara. Transkrip tersebut digunakan untuk bahan analisis di bab III.

#### ***1.6.6 Teknik Analisis Data***

Adapun teknik analisis data yang dilakukan melalui beberapa tahapan:

- 1) Menentukan inti dari dialog wawancara dari saduran transkrip wawancara,
- 2) Melakukan pengembangan inti tersebut melalui proses interpretasi sebagai bahan analisis data berkenaan dengan permasalahan penelitian,
- 3) Memberikan pandangan teori kritis terhadap dialog yang diujarkan oleh informan, terkait pandangan skeptisisme peneliti terhadap permasalahan penelitian.